

## IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Uga Bayu Anggara<sup>1\*</sup>, Binti Shofiatul Jannah<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : [ugabayu05@gmail.com](mailto:ugabayu05@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research aims to obtain an overview of the application of Government Accounting Standards (SAP) to financial reports in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 in the East Java Province Public Works Department of Highways. Using qualitative descriptive methods, data was collected through field studies with observations and interviews. The research results show that the East Java Province Public Works Department of Highways has carried out financial reporting well. This can be seen from the fact that before submitting a transfer request, the employee who is responsible for the financial report has planned what needs need to be purchased within Panjar, and has followed the procedures and provisions in preparing the financial report to be sent.*

**Keywords:** *Highways, Financial statements, Government Accounting Standards*

### Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Setiap alokasi anggaran yang dipergunakan dalam penyelenggaraan program pembangunan maka pada akhir kegiatan wajib dipertanggungjawabkan. Realisasi pertanggungjawaban ini dapat dilakukan melalui pelaporan keuangan yang dimana teknisnya mengikuti kebijakan masing-masing instansi atau satuan kerja. Anggaran yang sudah dilaporkan kemudian oleh staf keuangan akan diproses untuk dijadikan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi pengambilan keputusan di masa mendatang.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan oleh semua organisasi baik pada sektor publik maupun privat untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Adanya laporan keuangan juga sebagai usaha konkrit organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya mencapai good governance. Good governance adalah suatu sistem dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan agar organisasi mampu mengelola sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang menjunjung good governance ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi yang berlaku saat ini yaitu, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan yang baik harus

didasarkan pada empat karakteristik dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap ekonomi, politik, dan juga sosial. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diakses bagi pihak yang membutuhkannya (Dewishabrina, 2021). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku agar informasi keuangan yang terkandung didalam laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat dan dapat dipercaya bagi para pengguna informasi. Penyusunan laporan keuangan diperlukan oleh semua organisasi baik pada sektor publik maupun privat untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Adanya laporan keuangan juga sebagai usaha konkrit organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya mencapai good governance. Good governance adalah suatu sistem dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan agar organisasi mampu mengelola sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang menjunjung good governance ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi yang berlaku saat ini yaitu, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004.

Dinas PU Bina Marga Jawa Timur merupakan salah satu organisasi yang berada dalam struktur organisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di bawah kuasa gubernur. Dalam usahanya mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good government* maka diperlukan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan yang dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan. Laporan ini juga menjadi sebuah indikator apakah sebagai instansi daerah, kegiatan pengelolaan keuangan dinas sudah menerapkan sistem akuntansi pemerintah dengan baik di setiap periodenya atau belum. Sebagai organisasi yang wajib patuh regulasi, maka sudah seharusnya Dinas PU ini menyajikan laporan yang sesuai dengan ketentuan. Diperlukannya laporan keuangan atas kegiatan operasional yang menunjukkan niat bahwa Bina Marga bertanggungjawab atas semua tugas yang diberikan sesuai anggaran yang disusun. Hal ini bentuk tanggung jawab organisasi kepada para pemangku kepentingan bahwa organisasi melalui kepala dinas telah melaksanakan amanah dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari divisi keuangan dinas terintegrasi dengan pengelolaan masing-masing bidang. Diperlukannya standar akuntansi ini juga agar pelaporan keuangan dapat selaras dan para pemangku kepentingan juga dengan mudah membaca isinya. Penerapan standar akuntansi penting untuk menghasilkan laporan yang relevan dan andal sesuai dengan regulasi. Laporan yang berkualitas dan andal akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sepertinya halnya laporan keuangan swasta, laporan keuangan organisasi pemerintah juga terdiri dari beberapa seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta laporan kinerja dan lain sebagainya. Semua laporan tersebut dalam penyusunannya harus mencerminkan kebijakan atau peraturan SAP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Riyanto Utomo, Cahaya Elbash, 2016). Penerapan Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, didapatkan kesimpulan yaitu: Penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

sudah sesuai dengan PP N0 71 Tahun 2010. Sedangkan, berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Sri Hartati, Edduar Hendri, Emma Lilianti, 2020). Pertama, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2018 belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 karena dalam pencatatan dan pembukuan laporan keuangan cuma terdapat komponen laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kassedangkan komponen laporan keuangan yg berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang lainnya belum ada dan SAP di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang belum berbasisakrual karena transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi uang masuk dan keluar harus sama antara yang diterima dengan yang dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Kedua, sistem informasi pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan SIMDA Versi 2.7.7 cukup membantu dalam penerapan pelaporan keuangan. Ketiga, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual dengan melalui pelatihan-pelatihan dalam bentuk diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh BPKAD yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sedangkan, berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Ifatul Febriyani, M. Yahd, Ratna Wijayanti Daniar Paramita, 2019). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mengakui laporan keuangannya menggunakan metode cash basic sehingga belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan dasar cash basic tidak menunjukkan Laporan Arus Kas.

Laporan yang berkualitas dan andal akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sepertinya halnya laporan keuangan swasta, laporan keuangan organisasi pemerintah juga terdiri dari beberapa seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta laporan kinerja dan lain sebagainya. Semua laporan tersebut dalam penyusunannya harus mencerminkan kebijakan atau peraturan SAP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sebagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi memiliki dampak yang positif bagi laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan standar akuntansi oleh dinas menunjukkan bahwa laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar laporan keuangan yang berkualitas. Adapun pada kesempatan kali ini penulis ingin menekankan fokus pada penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pelaporan keuangan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

## TUJUAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

## MANFAAT

Terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap laporan keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur saat ini.
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan dapat menjadi acuan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam hal perekrutan dan sosialisasi bimbingan teknis, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian lainnya dan bahan masukan bagi semua pihak terutama untuk memberikan stimulus kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sektor pemerintahan dalam menghadapi perubahan basis akuntansi dimasa mendatang.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pemerintah pusat maupun daerah belum bisa menyusun laporan keuangan karna hal ini disebabkan belum tersedianya standar yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan pada saat itu. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010). Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan termasuk mengembangkan SAP.

### Institutional Theory

Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Scot) Menurut teori kelembagaan, struktur sosial yang sudah mapan, seperti aturan, nilai, dan keyakinan, sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan aktivitas masyarakat. Elemen-elemen ini memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan social oleh Hessels dan Terjesen pada 2008 (Wati, 2018). Dalam elemen kulturalkognitif, Jika sebelumnya peran masyarakat hanya sebatas menghadiri pertemuan formal, kini masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membentuk kebijakan melalui tekanan dan tuntutan. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalitas para pelakunya (Shabrina Agustin Ghassani, 2023).

## Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Munawir (2007:2) adalah “laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut IAI (2009:27) “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan”. Sedangkan menurut Kasmir (2012) “dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti”. Sedangkan, menurut Psak No 1 (revisi 2009) “menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan”.

## Laporan Keuangan Daerah

Tanjung (2009:274) menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu entitas. Hariadi, Restianto, dan Bawono (2010:122) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan. Halim dan Kusufi (2013:43) menyatakan Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang memerlukan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif (Djam'an Satori, 2015: 23). Pada penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017: 73). Wawancara ini dilakukan saat melaksanakan magang MBKM pada tanggal 02 Januari sampai 05 Mei 2024.

## Sub-judul metode penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan dengan observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan, wawancara merupakan metode untuk memperoleh data yang sangat akurat karena bersumber langsung dari pemilik tempat penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada satu periode dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pokok organisasi. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas haruslah mencakup dalam aspek keandalan, relevansi, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Akuntabilitas organisasi bergantung dari laporan keuangan yang dihasilkan. Jika laporan keuangan memenuhi kualitas yang sesuai dengan standar, maka menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi baik. Hal ini dapat diperoleh melalui penerapan standar akuntansi pemerintah pada pengelolaan keuangan dinas.

Setiap kegiatan yang dilakukan bina marga dalam usahanya menyelenggarakan infrastruktur jalan dan jembatan wajib untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagai perwujudan dari manajemen yang akuntabel dan transparan. Bina marga dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana merupakan organisasi pemerintah wajib untuk menerapkan standar yang diberlakukan pemerintah. Dalam hal ini, berarti bahwa dalam setiap pelaporan keuangan bina marga menggunakan standar akuntansi pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

Implementasi standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan dinas telah menunjukkan dampak yang positif, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan inspektorat yang memiliki opini WTP berturut-turut. Singkatnya, membuktikan bahwa laporan keuangan Dinas Bina Marga berada di kualitas yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur atas posisi keuangan dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh suatu entitas dalam hal ini adalah entitas akuntansi.

Untuk *case* ini, entitas akuntansinya adalah adalah Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sedang entitas pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi. Entitas akuntansi dapat diartikan sebagai unit organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan pengelolaan anggaran, kekayaan, serta kewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan atas dasar standar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan adalah unit organisasi pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Lebih lanjut, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9 dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan didasari agar entitas dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, alokasi realisasi anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas, serta kinerja keuangan. Penyajian laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam rangka evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya entitas terkait.

Dinas Bina Marga sebagai entitas akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan telah memenuhi komponen-komponen di atas sesuai yang diatur SAP, di antaranya terdapat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Beberapa laporan di atas, berisikan mengenai alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan program selama satu periode. Misalnya saja laporan realisasi anggaran merupakan

laporan yang berisikan mengenai rincian alokasi anggaran Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Adapun sebagai upaya meningkatkan standar akuntansi pemerintah pada pengelolaan keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur maka diperlukan pula SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya. Hal ini karena dengan SDM yang memiliki standar yang berkualitas akan berpengaruh pada penerapan SAP yang semakin efektif.

Pelatihan dan seminar mengenai peraturan SAP akan meningkatkan rasa tanggungjawab mereka agar laporan yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat dibaca pemangku kepentingan dengan lebih mudah. Ketersediaan sistem atau sarana prasarana dalam implementasi standar akuntansi pemerintah maka akan meningkatkan standar akuntansi pemerintah dalam operasional dinas.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem dari BPKD dalam membuat laporan keuangan. Untuk loginnya sendiri sudah di set dari BPKD sendiri sama halnya dengan laporan keuangannya, jadi tiap bidang memiliki password serta user ID masing-masing untuk login ke aplikasinya. Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menggunakan aplikasi ini yang telah disediakan oleh BPKD yang membedakannya hanya di nama dinas saja karena ada banyak sekali dinas yang melayani sesuai kebutuhan masyarakat.

Saat melakukan transaksi belanja untuk keperluan dinas menggunakan sistem tranfer, bisa juga menggunakan tunai yang namanya Ganti Uang (GU) dimana nilai transaksi harus dibawah 50 juta rupiah dan untuk transaksi yang nilainya di atas 50 juta rupiah perlu untuk mengajukan langsung ke keuangan dinas.

Pada pelaporan keuangan ada yang namanya penerimaan, misalnya dalam dinas dimana kami magang setiap bulannya akan ada pengajuan yang namanya Panjar, dimana pengajuan Panjar akan dikirim ke keuangan dinas. Jadi setiap bulannya dinas harus memiliki daftar perkiraan apa saja yang perlu dibelanjakan pada bulan itu atau pada bulan depan yang akan datang. Misalnya katakanlah pada bulan Februari karyawan bagian laporan keuangan mengirimkan pengajuan Panjar sebesar 100 juta rupiah dengan daftar perkiraan makan minuman rapat, untuk membeli perlengkapan dan peralatan kantor, untuk keperluan perjalanan dinas, dan sebagainya yang harus sudah tersedia, dan setelah dicek atau dievaluasi apakah jumlah yang diminta sesuatu dengan daftar perkiraan biaya, selanjutnya akan disetujui oleh keuangan dinas dan uang tersebut akan ditransfer melalui Ganti Uang (GU) dengan keterangan terima tranfer GU dari keuangan dinas. Dalam menerima uang tranfer dari keuangan dinas harus menentukan tanggal terimanya dan tanggal masuk ke rekening bank, serta telah ditentukan juga untuk nomor buktinya untuk bidang pemeliharaan.

Jadi, dalam daftar belanja sudah tersedia kode dalam aplikasi yang telah disediakan oleh BPKD, misalnya seperti belanja honor, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja peralatan kantor, dan seterusnya sudah tersedia kodenya sendiri-sendiri. Angka 5 adalah kode dari bidang pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dan untuk bidang lainnya seperti bidang pembangunan, bidang keuangan, bidang pengawasan, dan seterusnya bisa memilih kode 1, 4, 7, dan seterusnya.

Lalu pengeluaran, misalnya dinas waktu bulan kemarin mengajukan tranfer sebesar 100 s.d. 200 juta rupiah, lalu kas atau uang akan ditransfer ke dalam rekening dan masuk ke bank. Disini di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memiliki yang namanya

bendahara dinas namanya bendahara pengeluaran, dalam dinas masing-masing bidang memiliki bendahara pengeluarannya sendiri yang namanya bendahara pengeluaran pembantu. Dalam pengeluaran dinas juga perlu mencantumkan apa saja yang perlu dibeli, misalnya belanja makanan minuman untuk konsumsi rapat, terus mencantumkan keterangan kapan uang perlu ditransfer, dan pada tanggal berapa. Lalu dalam dinas jika keperluan makan minum biasanya tranfer menggunakan uang tunai, bisa juga menggunakan tranfer. Rentan waktu tranfer bisa seminggu sekali dan bisa seminggu dua kali, tapi biasanya sekali tranfer itu cukup banyak dan digunakan selama waktu bulan itu, misalnya belanja perjalanan dinas setiap orang akan ada SPJ nya masing-masing, biasanya dalam perjalanan dinas akan ada 4 sampai 6 orang yang dikirim yang memerlukan banyak pengeluaran untuk biaya perjalanan, akomodasi, makan minum, dalam laporan pengeluaran yang perlu diisi seperti nama karyawan yang melakukan perjalanan dinas, kemana tujuan perjalanan dinas, kegiatan apa yang dilakukan disana, dan pada tanggal berapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

Oleh karena itu, dalam pelaporan keuangan jumlah uang tunai yang ditarik tidak boleh lebih dari 5 juta rupiah, hal ini dikarenakan jika uang tunai pada laporan keuangan lebih dari lima juta rupiah berarti perlu dipertanyakan apakah pengeluaran dinas telah dilakukan dengan baik, misal dalam satu bulan dinas menarik untuk tunai sebesar 5 juta untuk keperluan pembelian bahan komputer dan makan minuman rapat, lalu uang yang tersisa kurang dari 2 juta rupiah yang kurang dari 5 juta rupiah yang menunjukkan laporan itu baik-baik saja, tetapi jika uang tunai yang tersisa sebelumnya masih ada sebesar 4 juta rupiah dan ditambah uang tunai yang ditarik dari bank sebesar 5 juta dan setelah digunakan untuk pengeluaran dinas dan uang tunai tersebut masih tersisa 6 juta rupiah yang di atas batas wajar 5 juta rupiah, hal ini dapat membuat dinas terlihat tidak baik/bagus dalam menggunakan uang tranfer dari keuangan dinas, ngomong-ngomong kenapa batas wajar untuk uang tunai sebesar 5 juta rupiah dalam laporan keuangan sudah ditentukan dari sananya.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pertanggungjawaban atas alokasi anggaran dalam penyelenggaraan tugas organisasi merupakan hal yang wajib dilakukan di akhir kegiatan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk konkritnya dengan output laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dari penerapan standar akuntansi yang sesuai dan benar. Pernyataan tersebut didasarkan atas kajian literatur yang dilakukan penulis yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi terutama di lingkup pemerintah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas artinya andal, relevan, dapat dipahami oleh semua para pemangku kepentingan.

Dinas PU Bina Marga provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas akuntansi yang mana menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.71 Tahun 2010. Dalam laporan yang dihasilkan hanya mencakup komponen atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, maka berada pada kewenangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelaporan keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari sebelum mengajukan permintaan tranfer karyawan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan telah melakukan perencanaan kebutuhan apa saja yang perlu dibeli didalam Panjar, dan telah mengikuti prosedur serta ketentuan dalam membuat laporan keuangan yang akan dikirim ke keuangan dinas melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BPKD untuk mempermudah karyawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam proses pembuatan laporan keuangan.

## Keterbatasan

Minimnya pendekatan longitudinal yang dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu saat luang selama magang dan terbatas wawancanya hanya dengan beberapa tokoh penting terkait bidang yang sedang dilakukan, dimana tidak bisa melakukan wawancara dengan tokoh yang memiliki tingkat atau japatan tinggi.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dapat menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang berbeda atau menggunakan SAP dengan UU yang berbeda yang dapat membantu dalam laporan keuangan daerah dinas pekerjaan umum bina marga jatim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
- Dewishabrina, A. I., Sugiartono, E., & Ristianingsih, I. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 115-123. Retrieved from <https://publikasi.polije.ac.id/asersi/article/view/2776>
- Dermawan, R. (2022). Memahami Good Corporate Governance (GCG) dan E-Government dalam menangani Masalah Korupsi
- Fahmi, Irham. (2012). Analisis laporan Keuangan. Alfabeta. Bandung.
- Fitriani, D., & Hwihanus, H. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerapan Siklus Produksi Dan Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Umkm*. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 26-38.
- Helmi Herawati. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. Vol. 2 No.1
- Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. (2013). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar E, dan Bawono. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasibuan, N. S. R., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Manajemen Sarana dan Prasarana Di MTs Al-Abror Muara

- Soma. Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal), 2(2), 79-98.
- Ifatul Febriyani, M. Yahd, Ratna Wijayanti Daniar Paramita. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal ekonomi dan bisnis, 19(2), 323-340
- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Trikonomika, 12(2), 201-214.
- Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- Khoirunisa, Nurulita (2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Jember.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munawir. (2007). Analisis laporan Keuangan Edisi ketiga Belas, liberty, Yogyakarta
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., Muda, I., & Yahya, I. (2022). Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Prosiding Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharmawangsa, 1(1), 78-84
- Nadine Harum, M. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pt. Satu Maju Hotelindo (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
- Pratiwi, A. I., Ardilatri, D., & Lulut, R. (2014). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang). Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 112420
- Pratiwi, A. I., Ardilatri, D., & Lulut, R. (2014). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang). Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 112420
- Rifangga Sukma Dewanta. (2015). Evaluasi Kesiapan Implementasi Pp No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur).
- Riyanto Utomo, Cahaya Elbash. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realsiasi Anggaran Berdasarkan Pp N0. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.
- Sri Hartati, Edduar Hendri, Emma Lilianti. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata RuangProvinsi Sumatera Selatan.
- Siti Hanyfah, Gilang Ryan Fernandes, Iwan Budiarmo. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. Jakarta, 19 Januari 2022
- Sri Hartati, Edduar Hendri, Emma Lilianti. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. DOI:  
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040>

- Simanjuntak, S. D., Hutahaean, M. O., Silalahi, E. D., Nababan, J., Siallagan, H., & Sipayung, R. C. (2024). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3524-3532.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191.
- Shabrina Agustin Ghassani, D. S. (2023). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor. *Majalah Geografi Indonesia*, 48-55.
- Wardhana, M. M. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Periode 2013-2017)* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Wati, E. (2018). Analisis Terhadap Pasal 122 Huruf L Undang–Undang. Indralaya <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>. “Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010”. Accessed 17 November, 2024.